

### BAB 3

## GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DAERAH KAB/KOTA DI JAWA TENGAH

### 3.1 Keadaan Geografis dan Pemerintahan

Propinsi Jawa Tengah adalah salah satu propinsi yang terletak di pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 3,25 juta hektar. Luas tersebut sekitar 25 persen dari total luas pulau Jawa dan 1,7 persen dari luas wilayah Indonesia. Propinsi Jawa Tengah sebelah Barat berbatasan dengan propinsi Jawa Barat, sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Propinsi Jawa Tengah beribukota di Semarang dan terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah itu merupakan jumlah terbanyak kedua setelah propinsi Jawa Timur.

### 3.2 Gambaran Perekonomian

#### 3.2.1 Gambaran PDRB dan Sektor-Sektor Perekonomian

Perkembangan ekonomi propinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan melalui nilai PDRB dari tahun ke tahun. PDRB menggambarkan produktivitas dari suatu daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada tabel 3.1 ditunjukkan besarnya PDRB propinsi Jawa Tengah sejak tahun 2004 sampai tahun 2008.

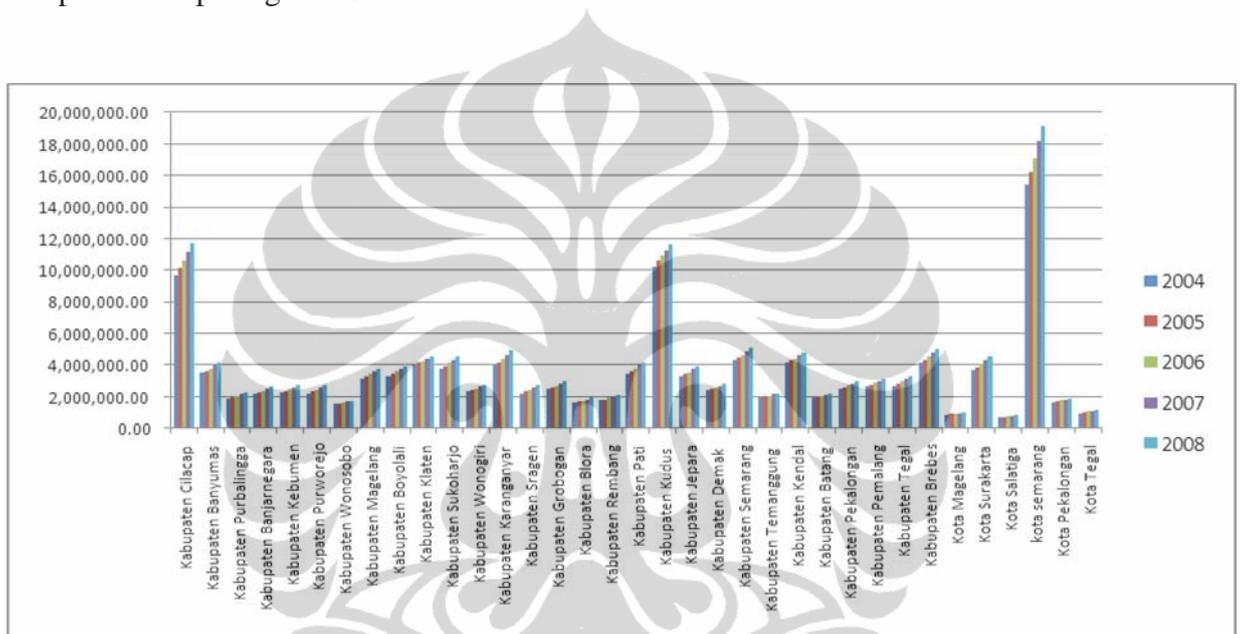
Tabel 3.1 PDRB Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008

No.	Tahun	PDRB menurut harga konstan tahun 2000 (dalam jutaan rupiah)	PDRB harga berlaku (dalam jutaan rupiah)
1.	2004	118.574.724,49	162.812.312,01
2.	2005	123.765.649,17	190.060.931,23
3.	2006	129.111.684,55	216.718.457,34
4.	2007	135.317.845,14	243.664.629,56
5.	2008	141.116.605,91	278.679.839,80

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2005-2009

Pada periode tersebut, porsi terbesar PDRB propinsi Jawa Tengah disumbangkan oleh tiga daerah yaitu kota Semarang, kabupaten Cilacap dan kabupaten Kudus. Kota Semarang rata-rata menyumbang sekitar 17 persen total

PDRB, kabupaten Cilacap menyumbang sebesar 8 persen dan kabupaten Kudus menyumbang 8 persen dari total PDRB propinsi Jawa Tengah. Kota Semarang adalah ibukota propinsi yang dominan dengan perdagangan dan jasa-jasa. Kabupaten Kudus terkenal dengan industri rokok yang menjadi sektor dominan. Kabupaten Cilacap dominan dengan sektor perdagangannya. Dengan demikian, sekitar 33 persen PDRB propinsi Jawa Tengah disumbangkan oleh ketiga daerah tersebut. Perkembangan PDRB harga konstan tahun 2000 periode 2004-2008 dapat dilihat pada grafik 3.1.



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009

Grafik 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2004 – 2008

Dilihat dari sektor perekonomian dengan klasifikasi 9 sektor, ada tiga sektor yang mempunyai porsi terbesar dalam PDRB Jawa Tengah, yaitu sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Rata-rata porsi sektor industri manufaktur terhadap PDRB pada periode tahun 2004-2008 adalah 32,9 persen. Sektor pertanian menyumbang sekitar 19,8 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sekitar 19,8 persen. Ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 72,6 persen dari total PDRB Jawa Tengah.

Tabel 3.2 Kontribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2004-2008

No.	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	19,90	19,11	20,34	20,43	19,60
2.	Pertambangan & Galian	0,96	0,97	1,02	1,00	0,97
3.	Industri Pengolahan	32,64	33,71	32,85	32,14	33,08
4.	Listrik, gas dan air bersih	1,22	1,20	1,12	1,09	1,03
5.	Bangunan	5,63	5,77	5,66	5,80	5,84
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	20,09	19,92	19,63	19,93	19,73
7.	Pengangkutan dan komunikasi	5,67	5,91	5,96	5,88	6,03
8.	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	3,73	3,56	3,40	3,46	3,48
9.	Jasa-jasa	10,16	9,85	10,02	10,27	10,25

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Dari tabel di 3.2 terlihat bahwa industri pengolahan mempunyai porsi terbesar, diikuti oleh sektor perdagangan dan sektor pertanian, serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor lain seperti sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan, listrik dan sektor pertambangan relatif tidak begitu dominan dengan porsi sekitar 5 persen ke bawah. Dari dominasi sektor terhadap PDRB, daerah-daerah di propinsi Jawa Tengah dapat dibagi ke dalam 4 golongan menurut sektor utama.

Tabel 3.3 menunjukkan penggolongan daerah menurut empat sektor dominan di propinsi Jawa Tengah berdasarkan pada PDRB tahun 2007 (tanpa migas). Dari tabel tersebut terlihat bahwa 19 kabupaten di Jawa Tengah masih didominasi sektor pertanian. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting di sebagian besar daerah meskipun bukan sebagai porsi terbesar dari PDRB propinsi. Beberapa kabupaten mengandalkan sektor perdagangan dan industri dan untuk daerah perkotaan pada umumnya mengandalkan sektor perdagangan dan sektor jasa. Hal ini karena daerah perkotaan lahan pertanian sudah berkurang dan lebih mengandalkan sektor non-pertanian. Kota Semarang, Pekalongan, Tegal dan Surakarta didominasi oleh sektor perdagangan. Sedangkan sektor jasa-jasa lebih dominan di kota Salatiga dan kota Magelang.

Tabel 3.3 Penggolongan daerah menurut sektor yang dominan pada tahun 2007

No.	Sektor	Kab/kota	Jumlah
1	Pertanian	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Brebes	19 kabupaten
2	Industri	Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan	7 kabupaten
3	Perdagangan	Kab. Klaten, Kab. Cilacap, Kab. Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal	3 kabupaten dan 4 kota
4	Jasa-jasa	Kota Magelang dan Kota Salatiga	2 kota

Sumber : Tunjauan PDRB Kab/kota Se-jawa tengah 2007

### 3.2.2 Perkembangan PDRB Perkapita

PDRB menunjukkan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, sedangkan PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena menunjukkan rata-rata pendapatan tiap orang. Perkembangan PDRB perkapita daerah di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.4. Pada tabel tersebut terlihat perbandingan antara PDRB berdasarkan harga konstan dengan PDRB perkapita dan perbandingan persentase kenaikan masing-masing tiap tahun. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB yang cenderung konstan di angka 4 persen. Sementara itu perkembangan PDRB perkapita lebih fluktuatif, dimana pada tahun 2005 terjadi kenaikan sekitar 2 persen. Kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 6 persen, kemudian tahun 2007 turun menjadi 3 persen dan pada tahun 2008 turun lagi menjadi 2 persen. Perkembangan PDRB perkapita lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mengingat PDRB perkapita adalah rata-rata PDRB tiap penduduk. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kenaikan PDRB yang besar pula bisa mengakibatkan penurunan tingkat kenaikan PDRB perkapita atau bahkan penurunan jumlah PDRB perkapita.

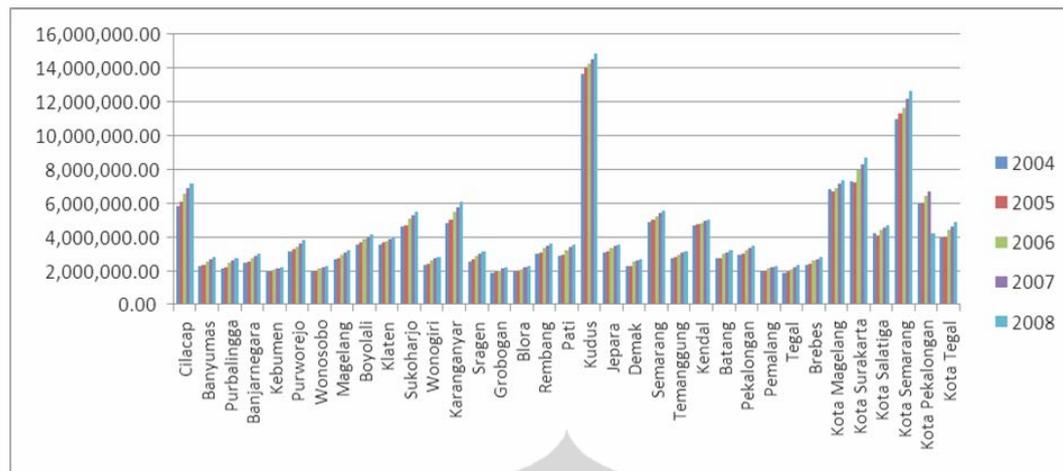
Tabel 3.4 Perbandingan PDRB konstan dan PDRB perkapita serta persentase kenaikannya

Tahun	PDRB harga konstan tahun 2000	persentase kenaikan	PDRB perkapita	persentase kenaikan
2004	118.574.724,49	-	136,02	-
2005	123.765.649,17	4,38%	138,78	2,03%
2006	129.111.684,55	4,32%	147,21	6,07%
2007	135.317.845,14	4,81%	152,93	3,89%
2008	141.116.605,91	4,29%	156,07	2,05%

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Untuk perbandingan besaran PDRB perkapita antar daerah dalam periode tahun 2004-2008 dapat dilihat pada grafik 3.2. Grafik tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dari sisi PDRB perkapita antardaerah. Hanya ada beberapa daerah yang mempunyai PDRB perkapita yang tinggi yaitu Kudus, Kota Semarang, kota Surakarta, kota Magelang dan Cilacap. Untuk daerah-daerah yang lain bisa dikatakan masih rendah PDRB perkapitanya.

Menurut data tentang PDRB dan PDRB perkapita serta dominasi sektoral, daerah-daerah yang mengandalkan sektor-sektor non-pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa-jasa memiliki nilai PDRB dan PBRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Selain itu daerah kota juga ternyata cenderung memiliki nilai PDRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten.



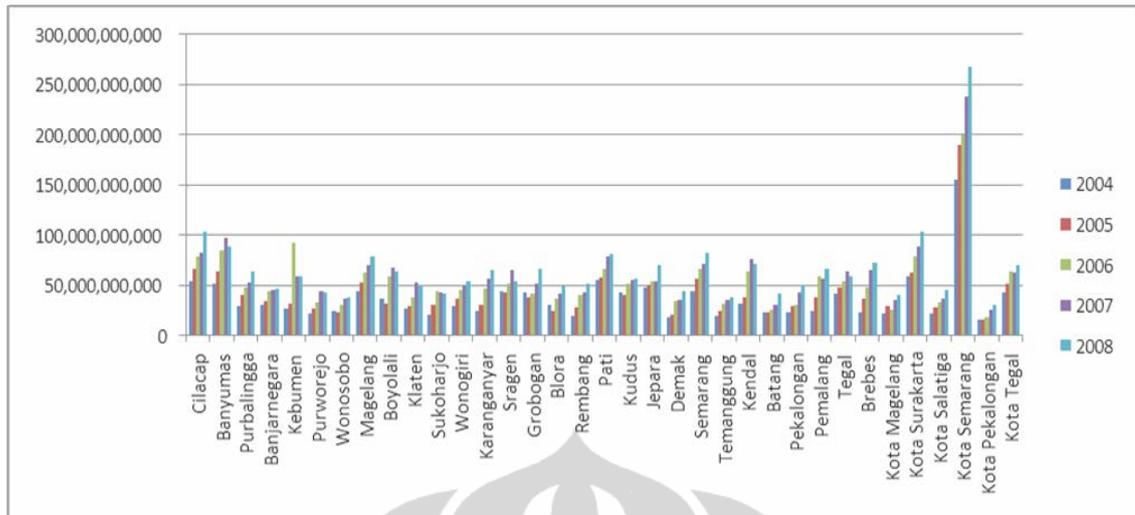
sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Grafik 3.2 Perkembangan PDRB perkapita kab/kota di Jawa Tengah 2004-2008

### 3.3 Gambaran Keuangan Daerah

#### 3.3.1 Gambaran PAD

Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penghasilan dari daerahnya sendiri. Hampir semua PAD di propinsi Jawa Tengah didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Pada grafik 3.3 ditunjukkan besaran PAD masing-masing daerah. Pada grafik tersebut terlihat hanya kota Semarang yang memiliki nilai PAD paling tinggi mencapai lebih dari 250 miliar rupiah. Sementara daerah-daerah yang lain bisa dikatakan relatif sama dan berkisar antara 40 sampai 100 miliar rupiah. Namun demikian porsi PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah relatif kecil terhadap total penerimaan daerah. Tabel 3.5 menggambarkan rata-rata porsi PAD terhadap total penerimaan daerah tiap-tiap daerah pada rentang waktu tahun 2004-2008.



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Grafik 3.3. Perkembangan PAD Tiap Daerah Tahun 2004-2008

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa hanya ada 10 daerah yang memiliki persentase PAD terhadap total penerimaan daerah bernilai lebih dari 10 persen. Daerah tersebut adalah Banyumas, Jepara, kab. Semarang, Kendal, Pati, kota Magelang, kota Surakarta, kota Semarang, kota Salatiga, dan kota Tegal. Dari 10 daerah tersebut yang mencapai angka lebih dari 15 persen hanya 3 daerah yaitu kota Semarang dengan persentase tertinggi yaitu 21 persen diikuti kota Tegal sebesar 18 persen dan kota Surakarta sebesar 15 persen. Fakta lain adalah persentase yang tinggi terjadi di daerah kota dimana 5 dari 6 kota memiliki persentase PAD lebih dari 10 persen. Dengan demikian daerah kota lebih berpotensi untuk mengoptimalkan sumber-sumber daya keuangan daerah untuk memajukan perekonomiannya. Namun demikian, PAD yang besar belum tentu menunjukkan daerah tersebut maju secara ekonomi. Dilihat dulu bagaimana pengoptimalan PAD yang terutama melalui pemungutan pajak dan retribusi tidak membebani masyarakat, dan bagaimana pengelolaan dana PAD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.5 Rata-rata Persentase PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2004-2008

No	Kab/kota	Persentase	No	Kab/kota	Persentase
1	Cilacap	9,43%	19	Kudus	9,90%
2	Banyumas	10,51%	20	Jepara	10,49%
3	Purbalingga	9,43%	21	Demak	6,03%
4	Banjarnegara	7,73%	22	Semarang	11,80%
5	Kebumen	8,20%	23	Temanggung	6,83%
6	Purworejo	6,44%	24	Kendal	10,08%
7	Wonosobo	6,88%	25	Batang	7,06%
8	Magelang	9,88%	26	Pekalongan	7,81%
9	Boyolali	8,85%	27	Pemalang	8,42%
10	Klaten	5,40%	28	Tegal	8,89%
11	Sukoharjo	7,01%	29	Brebes	6,79%
12	Wonogiri	7,05%	30	Kota Magelang	11,82%
13	Karanganyar	8,03%	31	Kota Surakarta	15,41%
14	Sragen	9,15%	32	Kota Salatiga	12,66%
15	Grobogan	8,08%	33	Kota Semarang	21,44%
16	Blora	6,93%	34	Kota Pekalongan	7,86%
17	Rembang	8,32%	35	Kota Tegal	18,85%
18	Pati	10,84%			

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Tabel 3.6 menunjukkan perbandingan antara rata-rata persentase PAD terhadap total penerimaan daerah dengan rata-rata PDRB perkapita tiap daerah pada tahun 2004-2008. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 10 daerah yang memiliki persentase PAD di atas 10 persen hanya kota Semarang yang mempunyai PDRB perkapita yang relatif tinggi. Sementara itu 9 daerah yang lain memiliki nilai PDRB perkapita yang tidak begitu besar. Justru ada beberapa daerah dengan persentase PAD di bawah 10 persen tetapi memiliki nilai PDRB perkapita yang cukup besar, yaitu Cilacap dan Kudus. Cilacap dan Kudus memiliki persentase PAD sebesar 9 persen. Sementara itu untuk daerah-daerah yang memiliki persentase PAD di bawah 10 persen kecuali Cilacap dan Kudus ternyata memiliki PDRB yang relatif kecil juga. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan porsi PAD yang besar belum tentu daerah tersebut mempunyai PDRB perkapita yang besar.

Tabel 3.6 Perbandingan Rata-rata Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah dengan Rata-rata PDRB perkapita Tahun 2004-2008

No.	Kab/kota	Persentase	PDRB perkapita (dlm jutaan rupiah)	No.	Kab/kota	Persentase	PDRB perkapita (dlm jutaan rupiah)
1	Cilacap	9,43%	6.495.917,47	19	Kudus	9,90%	10.931.923,02
2	Banyumas	10,51%	2.519.212,55	20	Jepara	10,49%	3.570.117,19
3	Purbalingga	9,43%	2.437.830,66	21	Demak	6,03%	2.577.241,73
4	Banjarnegara	7,73%	2.728.268,13	22	Semarang	11,80%	4.685.967,85
5	Kebumen	8,20%	2.054.347,76	23	Temanggung	6,83%	2.066.854,86
6	Purworejo	6,44%	3.435.300,81	24	Kendal	10,08%	4.462.221,84
7	Wonosobo	6,88%	2.134.180,73	25	Batang	7,06%	2.035.377,38
8	Magelang	9,88%	2.942.449,81	26	Pekalongan	7,81%	2.723.459,11
9	Boyolali	8,85%	3.857.344,45	27	Pemalang	8,42%	2.883.646,09
10	Klaten	5,40%	3.775.360,19	28	Tegal	8,89%	2.970.762,17
11	Sukoharjo	7,01%	5.031.462,85	29	Brebes	6,79%	4.562.561,28
12	Wonogiri	7,05%	2.566.130,91	30	Kota Magelang	11,82%	911.877,89
13	Karanganyar	8,03%	5.439.983,76	31	Kota Surakarta	15,41%	4.089.740,67
14	Sragen	9,15%	2.853.766,56	32	Kota Salatiga	12,66%	758.467,02
15	Grobogan	8,08%	2.031.781,94	33	Kota Semarang	21,44%	17.203.019,11
16	Blora	6,93%	2.100.586,08	34	Kota Pekalongan	7,86%	1.616.022,12
17	Rembang	8,32%	3.326.760,42	35	Kota Tegal	18,85%	1.057.918,22
18	Pati	10,84%	3.211.754,27				

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

### 3.3.2 Gambaran DAU

DAU dalam memiliki porsi cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah. DAU adalah dana transfer yang digunakan sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Ketimpangan antar daerah yang cukup besar menyebabkan DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat juga besar. Dalam komponen penerimaan daerah, DAU merupakan komponen dengan porsi yang terbesar. Tabel 3.7 menggambarkan porsi DAU total daerah-daerah di Jawa Tengah terhadap total penerimaan daerah seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 3.7 Persentase Total DAU terhadap Total Penerimaan Daerah Seluruh Daerah di Jawa Tengah Tahun 2004-2008

No	Tahun	persentase total DAU terhadap total penerimaan
1	2004	72,96%
2	2005	68,73%
3	2006	74,90%
4	2007	71,80%
5	2008	69,21%

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa porsi DAU cukup besar sebagai komponen dalam penerimaan daerah. Persentase DAU dari semua daerah tiap tahun bisa mencapai 70 persen dari total penerimaan daerah. Besarnya porsi ini seharusnya diikuti dengan pelayanan publik yang memadai, karena DAU diberikan agar daerah bisa melakukan tugas pelayanan minimal dalam rangka desentralisasi. Besaran persentase tiap-tiap daerah cukup bervariasi tetapi pada umumnya porsi yang masih cukup besar terhadap total penerimaan. Tabel 3.8 menunjukkan rata-rata persentase DAU terhadap total penerimaan daerah tiap kabupaten/kota pada tahun 2004-2008 dan perbandingannya terhadap PDRB perkapitanya. Dari tabel tersebut hampir semua daerah memiliki persentase sekitar 70 persen dan bahkan ada yang mencapai 80 persen yaitu Brebes dan kab. Pekalongan. Hanya ada 2 daerah yang memiliki persentase DAU di bawah 60 persen yaitu kota Surakarta dan kota Semarang. Kota Semarang memiliki nilai 44 persen dan kota Surakarta memiliki persentase DAU sebesar 59 persen.

Tabel 3.8. Rata-rata Persentase DAU Terhadap Total Penerimaan Daerah dan PDRB perkapita Tahun 2004-2008

No	Kab/kota	Persentase	PDRB perkapita (dlm jutaan rupiah)	No	Kab/kota	Persentase	PDRB perkapita (dlm jutaan rupiah)
1	Cilacap	66,44%	6.495.917,47	19	Kudus	63,59%	14.261.435,52
2	Banyumas	77,80%	2.519.212,55	20	Jepara	67,00%	3.333.127,42
3	Purbalingga	67,04%	2.437.830,66	21	Demak	70,80%	2.483.011,01
4	Banjarnegara	61,96%	2.728.268,13	22	Semarang	65,65%	5.225.264,63
5	Kebumen	78,01%	2.054.347,76	23	Temanggung	73,04%	2.931.652,23
6	Purworejo	74,18%	3.435.300,81	24	Kendal	68,42%	4.846.693,41
7	Wonosobo	75,67%	2.134.180,73	25	Batang	72,26%	2.951.558,24
8	Magelang	70,35%	2.942.449,81	26	Pekalongan	69,13%	3.215.780,32
9	Boyolali	74,44%	3.857.344,45	27	Pemalang	76,34%	2.122.925,97
10	Klaten	76,21%	3.775.360,19	28	Tegal	75,43%	2.079.852,68
11	Sukoharjo	72,55%	5.031.462,85	29	Brebes	77,48%	2.555.620,38
12	Wonogiri	71,18%	2.566.130,91	30	Kota Magelang	71,07%	6.998.318,59
13	Karanganyar	65,62%	5.439.983,76	31	Kota Surakarta	56,03%	7.885.657,91
14	Sragen	71,87%	2.853.766,56	32	Kota Salatiga	57,68%	4.379.692,00
15	Grobogan	76,96%	2.031.781,94	33	Kota Semarang	47,46%	11.750.917,78
16	Blora	67,32%	2.100.586,08	34	Kota Pekalongan	74,34%	5.864.976,19
17	Rembang	68,78%	3.326.760,42	35	Kota Tegal	61,07%	4.375.264,51
18	Pati	68,05%	3.211.754,27				

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Jika dilihat dari klasifikasi daerah kota dan daerah kabupaten, maka daerah kota memiliki persentase DAU yang lebih rendah (di bawah 70%) dengan persentase terendah adalah kota Semarang. Hampir semua daerah kabupaten mencapai angka lebih dari 70 persen. Hanya ada 2 daerah kabupaten yang bernilai di bawah 70 persen yaitu Kudus dan Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota lebih memiliki kemandirian keuangan daripada daerah kabupaten dan secara umum hanya kota Semarang yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik, sementara itu daerah-daerah yang lain masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap DAU mengingat porsi yang lebih dari setengah dari total

penerimaan daerah. Dilihat dari perbandingan porsi DAU dengan nilai PDRB perkapita maka terlihat adanya variasi antar daerah. Daerah kota dengan porsi DAU yang lebih kecil nilai PDRB perkapita relatif lebih tinggi daripada daerah kabupaten. Sementara itu sebagian besar daerah kabupaten dengan porsi DAU yang besar justru memiliki nilai PDRB perkapita yang relatif rendah. Daerah kabupaten dengan porsi DAU tinggi dan nilai PDRB perkapita yang juga tinggi adalah Cilacap dan Kudus.

Dari gambaran keuangan daerah baik melalui PAD dan DAU dan perbandingan dengan nilai PDRB perkapita, belum terdapat pola yang jelas antara hubungan PAD, DAU dan PDRB perkapita. Namun dengan adanya nilai PAD tertinggi dan porsi DAU terendah yang ditunjukkan oleh kota Semarang, kondisi tersebut secara kasar menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik.

### 3.4 Gambaran Kependudukan dan Ketenagakerjaan

#### 3.4.1 Gambaran Penduduk

Dalam rentang waktu tahun 2004-2008 jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai sekitar 32 juta jiwa. Jumlah ini adalah yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk tersebut menyumbang sekitar 15 persen jumlah penduduk nasional. Jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan penduduk pria. Tabel 3.9 menggambarkan perkembangan penduduk Jawa Tengah antara tahun 2004-2008.

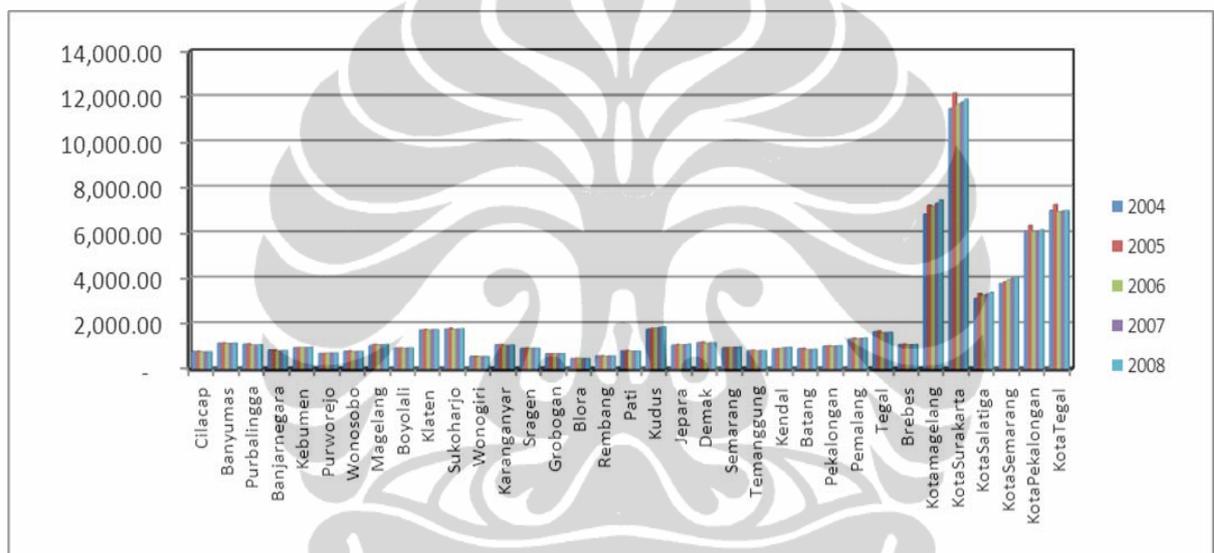
Tabel 3.9 Perkembangan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2004-2008.

Tahun	Jumlah penduduk	Persentase nasional	Kepadatan rata-rata
2004	32.394.371	15%	995,49
2005	32.903.860	15%	1.011,21
2006	32.189.470	14%	988,74
2007	32.378.731	14%	994,97
2008	32.623.725	14%	1.002,53

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan penduduk Jawa Tengah cenderung stabil dengan jumlah 32 juta jiwa dan memberikan porsi 14 – 15 persen penduduk nasional.

Dilihat dari kelompok usia, jumlah penduduk pada usia 10 – 60 tahun mencapai 73 persen. Kelompok usia 0 – 10 tahun ada 17 persen dan untuk kelompok usia di atas 60 persen sekitar 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Jawa Tengah sebagian besar adalah usia produktif untuk bekerja. Jika dilihat dari persebaran penduduk maka persebaran tidak terjadi secara merata. Penduduk pada umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan.



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Grafik 3.4 Kepadatan Penduduk Tiap Daerah Tahun 2004-2008

Grafik 3.4 menunjukkan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah. Pada grafik tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk yang relatif tinggi terdapat di daerah perkotaan dengan kepadatan tertinggi di kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 12 ribu jiwa per kilometer persegi. Untuk kota-kota yang lain tingkat kepadatannya antara 3 ribu sampai 7 ribu jiwa per kilometer persegi. Sementara itu untuk daerah kabupaten, kepadatan penduduknya dibawah 2 ribu jiwa per kilometer persegi. Bahkan ada kabupaten yang tingkat kepadatannya sekitar 500 jiwa per kilometer persegi yaitu Blora, Rembang dan Wonogiri. Penduduk yang

lebih terkonsentrasi di perkotaan memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berbeda antara daerah kabupaten dan daerah kota

### 3.4.2 Gambaran Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas. Dalam periode 2004-2008 jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah berkisar antara 14 sampai 16 juta jiwa. Persentase tenaga kerja terhadap angkatan kerja berkisar antara 55 persen sampai mendekati 60 persen. Perkembangan jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah dan persentase jumlah tenaga kerja terhadap tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 . Jumlah Tenaga kerja dan Persentasenya terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja serta Persentase Terhadap Angkatan Kerja 2004-2008

Tahun	Jumlah tenaga kerja	Persentase terhadap penduduk usia kerja	Persentase terhadap angkatan kerja
2004	14.930.097	56,07%	93,46%
2005	15.503.666	56,74%	93,20%
2006	15.553.405	57,52%	92,71%
2007	16.000.863	59,71%	90,58%
2008	15.463.658	56,92%	92,65%

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Pada tabel 3.10 terlihat perkembangan jumlah tenaga kerja relatif stabil tidak ada lonjakan kenaikan maupun penurunan. Dilihat dari persentase jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja juga menunjukkan porsi yang relatif stabil. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja yang dilihat dari persentase tenaga kerja terhadap angkatan kerja menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu di atas 90 persen. Hal ini berarti angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah cukup kecil yaitu kurang dari 10 persen.

Dilihat dari penyebaran tenaga kerja dalam sektor-sektor perekonomian, ada 4 sektor yang dominan yaitu pertanian, industri, perdagangan dan sektor jasa. Sektor lain relatif mempunyai persentase di bawah 10 persen. Pada tabel 3.11 ditunjukkan persentase jumlah tenaga tiap sektor terhadap total tenaga kerja. Pada

tabel tersebut terlihat bahwa sektor pertanian adalah sektor paling besar dalam menyerap tenaga kerja dengan persentase mencapai sekitar 40 persen. Sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar ke dua adalah sektor perdagangan dengan persentase 20 persen. Sektor industri di tempat ketiga dengan persentase sekitar 17 persen. Sektor jasa menyerap sekitar 10 persen dari total tenaga kerja. Dari keempat sektor ini sudah menyerap sekitar 87 persen dari total tenaga kerja.

Tabel 3.11 Persentase Tenaga Kerja per Sektor Tahun 2004-2008

No	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	41,81%	37,53%	36,57%	37,71%	36,84%
2	Pertambangan dan Galian	0,56%	0,59%	0,79%	0,85%	8,80%
3	Industri	16,03%	16,59%	17,92%	16,96%	17,48%
4	Listrik, Gas & Air bersih	0,19%	0,14%	0,19%	0,15%	0 *
5	Konstruksi	5,51%	6,51%	7,04%	6,89%	6,51%
6	Perdagangan	20,13%	21,91%	20,54%	20,96%	21,05%
7	Komunikasi	4,48%	4,56%	4,25%	4,53%	4,63%
8	Keuangan	0,86%	0,90%	1,04%	0,91%	1,09%
9	Jasa	10,32%	11,17%	11,59%	11,03%	11,40%
10	Lainnya	0,11%	0,12%	0,08%	0,00%	0,00%

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

\*) untuk tahun 2008 sektor pertambangan dan konstruksi digabung dalam satu sektor

Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja sampai 40 persen, tetapi tidak diikuti dengan persentase PDRB yang besar pula. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 20 persen PDRB total. Sementara itu sektor industri yang menyerap sekitar 17 persen tenaga kerja justru menyumbang porsi terbesar PDRB yang mencapai lebih dari 30 persen. Sektor perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebesar 20 persen menyumbang PDRB sekitar 20 persen pula. Hal ini menunjukkan adanya dugaan bahwa sektor industri dan perdagangan lebih produktif dibandingkan sektor pertanian. Selain itu ada kemungkinan bahwa marjinal tenaga kerja di sektor pertanian mulai mengecil dalam arti penambahan tenaga kerja di sektor pertanian tidak lagi menambah produktivitas di sektor pertanian. Hal lain adalah bahwa persentase tenaga kerja di

sektor pertanian mulai mengalami penurunan dimana tahun 2004 sekitar 40 persen menjadi sekitar 37 persen pada tahun 2008. Untuk sektor industri, perdagangan dan jasa cenderung mengalami peningkatan persentase walaupun tidak signifikan.

### 3.5 Gambaran Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Kerja

Tingkat pendidikan penduduk usia kerja pada umumnya akan menentukan kualifikasi tenaga kerja tersebut. Misalnya untuk sektor-sektor tertentu membutuhkan tenaga kerja terampil atau tenaga kerja dengan level pendidikan tertentu. Level pendidikan yang lebih tinggi akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Penduduk usia kerja lulusan SMA atau yang lebih tinggi dianggap memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk bekerja pada sektor-sektor yang lebih produktif. Data di Jawa Tengah menunjukkan bahwa rata-rata persentase penduduk usia kerja yang lulus SMA atau lebih terhadap total penduduk usia kerja relatif rendah tetapi dari tahun 2004-2008 mengalami peningkatan. Tabel 3.12 menunjukkan perkembangan persentase tersebut.

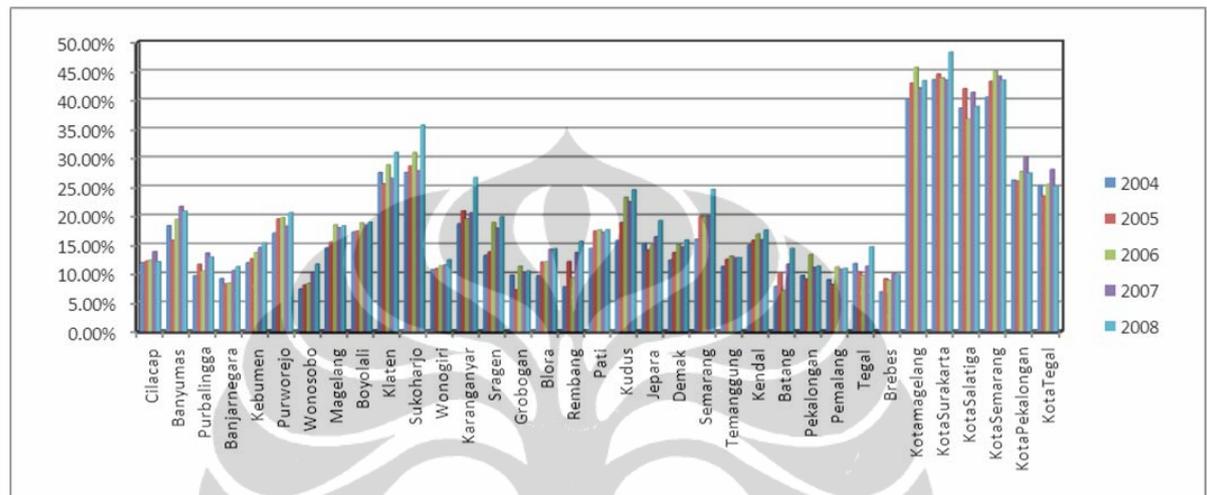
Tabel 3.12 Persentase Penduduk Usia Kerja Lulusan SMA ke atas Terhadap Total Penduduk Usia Kerja Tahun 2004-2008

Tahun	Persentase
2004	18,53%
2005	18,84%
2006	19,03%
2007	19,02%
2008	19,35%

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Jika dilihat persentase tiap daerah maka akan terlihat perbedaan nilai persentase antara daerah kota dengan daerah kabupaten. Daerah kota persentasenya lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten. Untuk daerah kabupaten hanya daerah-daerah tertentu saja yang relatif tinggi tetapi masih lebih rendah dibandingkan daerah kota. Pada grafik 3.5 terlihat perbandingan besaran persentase penduduk usia kerja lulusan SMA atau lebih terhadap total penduduk usia kerja. Pada grafik tersebut terlihat bahwa daerah kota memiliki persentase

yang lebih tinggi yaitu antara 25 sampai 50 persen. Kota Semarang, Surakarta, Magelang dan Salatiga memiliki persentase lebih dari 40 persen dan kota Pekalongan dan kota Tegal memiliki persentase sekitar 25 sampai 30 persen. Sementara itu untuk daerah kabupaten hampir semuanya di bawah 25 persen kecuali untuk daerah Klaten dan Sukoharjo.



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

Grafik 3.5. Perbandingan Persentase Penduduk Usia Kerja Lulusan SMA ke atas Terhadap Total Penduduk Usia Kerja Tiap Daerah Pada Tahun 2004-2008

Terkait dengan sektor dominan, maka daerah-daerah yang didominasi sektor-sektor non-pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa memiliki persentase penduduk usia kerja lulusan SMA atau lebih yang lebih tinggi. Daerah kota didominasi oleh sektor industri perdagangan dan jasa, kabupaten Klaten didominasi oleh sektor perdagangan dan Sukoharjo didominasi oleh sektor industri. Sementara itu daerah-daerah yang lain pada umumnya masih didominasi oleh sektor pertanian nilai persentasenya lebih rendah. Untuk sektor non-pertanian lebih membutuhkan tenaga kerja dengan level pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.

## BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

### 4.1 Spesifikasi Model

Penelitian ini menggunakan teori Solow dengan memasukkan unsur *human capital* sebagai landasan teori untuk pembentukan model penelitian. Dalam teori ini variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu modal fisik, *human capital* atau kualitas SDM, dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah variabel eksogen sedangkan variabel lain sebagai variabel endogen. Secara matematis model pertumbuhan ini dapat ditulis sebagai bentuk fungsi sebagai berikut.

$$\text{Ln } \frac{Y_i}{L_i} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)} \text{Ln } \frac{K_i}{Y_i} + \text{Ln } \frac{H_i}{L_i} + \text{Ln } A_i \dots\dots\dots (9)$$

dimana  $Y/L$  menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB perkapita.  $A$  adalah residual yang mencakup kemajuan teknologi.  $L$  menggambarkan kuantitas tenaga kerja dan  $H$  menggambarkan kualitas *service labor* atau produktivitas dari tenaga kerja.  $K/Y$  menunjukkan *capital-output ratio* yang menggambarkan porsi modal terhadap PDRB suatu daerah.  $H/L$  menunjukkan tingkat kualitas dari tenaga kerja.

Sementara itu, untuk menguji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antara daerah sektor pertanian dengan sektor non-pertanian dilakukan uji ANOVA (*Analysis of Variance*). Uji ini akan menguji rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dari kelompok daerah sektor pertanian dan sektor non-pertanian.

### 4.2 Penentuan Variabel

Berdasarkan teori pertumbuhan Solow Modifikasi dengan *Human Capital*, variabel-variabel pertumbuhan ekonomi adalah modal, tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Dari model persamaan (9), penulis menambahkan variabel kuantitas tenaga kerja sebagai variabel kontrol sehingga model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$\ln \frac{Y_i}{L_i} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)} \ln \frac{K_i}{Y_i} + \frac{H_i}{L_i} + \ln L + \ln A_i \dots\dots\dots (10)$$

$Y_i/L_i$  adalah output per pekerja, dan dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita. PDRB perkapita adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati arah tingkat kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan PDRB. Hal ini juga relevan dengan tujuan dari desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nilai PDRB perkapita yang digunakan adalah PDRB harga berlaku tahun bersangkutan dibagi jumlah penduduk tahun tersebut agar bisa diperbandingkan dengan variabel-variabel independen seperti PAD dan DAU yang mencerminkan nilai pada tahun berjalan.

A adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksogen termasuk di dalamnya adalah perkembangan teknologi. Faktor-faktor ini biasa disebut *Total Factor Produktivity* (Bhinadi:2003). Dalam model ekonometrika, A adalah sebagai *intercept* atau konstanta. Nilai A menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi tanpa variabel-variabel independen.

Modal fisik (K) bersifat umum dan luas sehingga dalam berbagai penelitian bisa dijabarkan dalam variabel-variabel yang lebih rinci yang bisa mewakili unsur modal fisik. Demikian pula dengan variabel L dan variabel H. Variabel L sebagai variabel kontrol bisa melalui jumlah tenaga kerja atau dengan jumlah penduduk. Sedangkan variabel kualitas SDM biasanya diukur melalui tingkat pendidikan penduduk secara umum dan lebih rinci adalah tingkat pendidikan tenaga kerja. Pada tabel 4.1 dijabarkan beberapa variabel dalam beberapa penelitian yang digolongkan dalam modal fisik, kualitas SDM maupun tenaga kerja.

Tabel 4.1 Penjabaran Variabel-variabel Independen dalam Model Pertumbuhan Ekonomi

No.	Varibel	Penjabaran Variabel
1	Modal fisik	PAD, DAU dan DBH (Pujiati : 2008), Dana Perimbangan (Pusporini: 2003), Investasi lokal dan aliran dana yang masuk (Bhinadi : 2003), Rasio PAD terhadap penerimaan perkapita, rasio PAD terhadap penerimaan total daerah, rasio dana perimbangan terhadap penerimaan daerah, rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja daerah, investasi riil daerah, rasio ekspor terhadap PDRB (Kharisma:2006)  Infrastruktur, total penerimaan, belanja pembangunan (Haryanto:2006), Sumber daya keuangan, UMR, desentralisasi fiskal (Adirinekso:2001), stok modal pemerintah dan swasta (Suharto:2006), PMTDB (Budiono:2001)
2	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja oleh (Pujiati:2008), (Bhinadi:2003), Jumlah penduduk (Haryanto :2006)
3	Kualitas SDM	Porsi tenaga kerja berpendidikan terhadap total tenaga kerja (Budiono:2001), Angka melek huruf, tamat SLTP dan lamanya belajar (Baskoro:2004), Rasio penduduk tamat SMP ke atas terhadap jumlah penduduk (Wibowo:2008), <i>educational attainment</i> sekolah menengah (Bhinadi:2003)

Dari penjabaran variabel-variabel dalam tabel tersebut, penulis memasukkan variabel PAD dan DAU sebagai unsur pembentuk modal. PAD dan DAU merupakan suntikan dana ke pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk kegiatan investasi. Di era desentralisasi fiskal, peran PAD seharusnya meningkat seiring dengan wewenang pemerintah daerah yang bertambah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari daerah. DAU pada saat awal desentralisasi fiskal merupakan dana transfer yang paling besar porsinya bagi penerimaan daerah sehingga memegang peranan penting dalam memacu pembangunan di daerah termasuk dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi akan meningkatkan modal fisik dan bisa meningkatkan nilai *capital-ouput ratio*.

Untuk variabel DAU akan dilihat pengaruhnya tiap daerah sehingga bisa terlihat perbandingan pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Hal ini karena adanya beberapa penelitian dari Pujiati (2008) yang menyebutkan pengaruh negatif DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dan Kharisma (2006) yang menyebutkan bahwa DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel tenaga kerja diukur dengan jumlah tenaga kerja tiap-tiap daerah dan variabel *human capital* diukur melalui persentase penduduk usia kerja lulusan SMA atau lebih terhadap total penduduk usia kerja. Terbatasnya data tingkat pendidikan untuk tenaga kerja membuat penulis menggunakan data tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Asumsi yang dipakai adalah penduduk usia kerja kemungkinan besar akan masuk sebagai angkatan kerja dan tingkat pengangguran yang kurang dari 10 persen membuat sebagian angkatan kerja tergolong dalam kategori tenaga kerja. Dengan demikian tingkat pendidikan penduduk usia kerja bisa merepresentasikan tingkat pendidikan tenaga kerja.

Dengan demikian model ekonometrika dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut.

$$\ln \text{PDRB}/\text{cap}_{it} = \alpha_0_{it} + \alpha_1 \ln \text{PAD}_{it} + \alpha_2 \ln \text{DAU}_{it} + \alpha_3 \ln L_{it} + \alpha_4 \ln \text{SMA}_{it} \quad (11)$$

dimana

- $\text{PDRB}/\text{cap}_{it}$  : PDRB perkapita kabupaten/kota i pada tahun t
- $\alpha_{it}$  : Intersep dari model yang menunjukkan *total factor productivity* yang mencakup kemajuan teknologi kab/kota
- $\text{PAD}_{it}$  : Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota i pada tahun t,
- $\text{DAU}_{it}$  : Dana Alokasi Umum kabupaten/kota i pada tahun t
- $L_{it}$  : Kuantitas tenaga kerja kabupaten/kota i pada tahun t,
- $\text{SMA}_{it}$  : Persentase angkatan kerja lulusan SMA/ sederajat atau lebih terhadap angkatan kerja total kab/kota i pada tahun t.

Sementara itu untuk menguji perbedaan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi, ditentukan dulu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dihitung sebagai berikut.

$$\text{Tingkat pertumbuhan} = \frac{(\text{PDRB perkapita}_t - \text{PDRB perkapita}_{t-1})}{\text{PDRB perkapita}_{t-1}} \dots\dots(12)$$

### 4.3 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) dengan format data panel. Data ini menggabungkan data yang bersifat *time series* dan data *cross section*. Data untuk variabel dependen ditunjukkan dengan data PDRB perkapita yang menunjukkan kesejahteraan tiap orang. PDRB perkapita tahun  $t$  diperoleh dari data PDRB tahun  $t$  dibagi jumlah penduduk pada tahun  $t$ .

$$\text{PDRB perkapita tahun berjalan}_t = \frac{\text{PDRB tahun berjalan}_t}{\text{jumlah penduduk}_t} \dots\dots\dots(13)$$

Komponen-komponen penerimaan keuangan daerah yang dijadikan variabel independen adalah PAD dan DAU. Hal ini sejalan dengan adanya desentralisasi fiskal yang menyebabkan penerimaan daerah melalui PAD dan DAU menjadi meningkat. Selain itu DAU juga merupakan komponen terbesar dalam penerimaan daerah. Variabel kualitas pendidikan ditunjukkan dengan persentase penduduk usia kerja lulusan SMA/ sederajat atau lebih (D1, D3, dan sarjana) terhadap total penduduk usia kerja. Menurut BPS, angkatan kerja adalah penduduk yang berusia di atas 10 tahun. Variabel kuantitas tenaga kerja diperoleh dari data jumlah tenaga kerja tiap-tiap daerah.

Perbedaan dominasi sektoral tiap kabupaten/kota dalam penelitian ini digolongkan menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok dengan dominasi sektor pertanian terdiri dari 19 kabupaten. Kelompok 2 yang didominasi sektor non-pertanian (industri, perdagangan dan jasa) terdiri dari 10 kabupaten dan 6 kota. Pembagian ini didasarkan pada data *leading sector* dari BPS untuk tahun 2007 dengan asumsi pada rentang waktu penelitian tidak ada perubahan

yang drastis dalam dominasi sektoral tiap kabupaten/kota. Penggolongan ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Penggolongan Kabupaten/kota di Jawa Tengah Menurut Sektor Pertanian dan Sektor Non-pertanian

Sektor Pertanian	Sektor non-pertanian (Industri Perdagangan dan Jasa)
Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Brebes (19 kabupaten)	Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Klaten, Kab. Cilacap, Kab. Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Salatiga ( 10 kabupaten dan 6 kota)

Sumber : Tinjauan PDRB tahun 2007 BPS

Sementara itu untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian dan referensi data dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Jenis Data dan Sumber Data (Referensi)

No.	Macam data	Sumber data (Referensi)
1	PDRB	Jawa Tengah dalam angka 2005-2009
2	Kuantitas penduduk	Jawa Tengah dalam angka 2005-2009
3	PDRB perkapita	Perhitungan data 1 dan 2
4	PAD dan DAU	Jawa Tengah dalam angka 2009 dan Statistik keuangan Kab/kota tahun 2005-2008
5	Kuantitas tenaga kerja	Jawa Tengah dalam angka 2005-2009
6	Jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan	Jawa Tengah dalam angka 2005-2009

#### 4.4 Prosedur estimasi

##### 4.4.1 Estimasi regresi linear

Regresi linear terhadap model dilakukan dengan menggunakan program *evIEWS* 4.1. Dari hasil regresi akan dilihat uji t dan uji F beserta signifikansinya untuk tiap-tiap variabel independen. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam uji ini dianggap berdiri sendiri dalam mempengaruhi variabel dependen dan variabel lain dianggap konstan. Uji F bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Untuk uji t dan uji F menggunakan tingkat kepercayaan 5 persen. Uji yang lain adalah uji *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* menggambarkan keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan pada variabel independen.

Dalam regresi linear, model harus lolos dari uji asumsi klasik. Uji yang dilakukan adalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji multikolinearitas adalah untuk mendeteksi apakah ada hubungan yang sangat erat antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat hasil regresi. Ciri-ciri terjadi multikolinearitas antara lain nilai *R square* yang besar tetapi koefisien sebagian besar variabel independen menjadi tidak signifikan. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji adanya error yang sangat berbeda jauh. Heteroskedastisitas bisa disebabkan karena data bersifat *cross section* cukup besar. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dapat diatasi dengan fasilitas *white heteroscedasticity covariance*. (Pujiati:2008)

Dari regresi data panel, metode *random effect* dan metode *fixed effect* dinilai lebih baik daripada metode *common* karena dalam metode *random effect* maupun *fixed effect*, intersep dari tiap-tiap objek akan berbeda sehingga lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan dalam metode *common*, intersep tiap objek dianggap sama. Oleh karena itu penelitian ini akan dibandingkan hasil estimasi antara metode *random effect* dengan *fixed effect*, kemudian dipilih model yang paling baik dari sisi *R square*, tingkat signifikansi koefisien variabel independen dan kondisi terbebas dari asumsi multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

#### 4.4.2 Estimasi Uji Varian

Untuk uji beda rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi antara daerah sektor pertanian dengan sektor non-pertanian dilakukan dengan uji ANOVA dimana

$H_0$  : tidak terjadi perbedaan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi antara daerah sektor pertanian dengan daerah sektor non-pertanian

$H_1$  : terjadi perbedaan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi antara daerah sektor pertanian dengan daerah sektor non-pertanian

Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat penyimpangan sebesar 5 persen, maka  $H_0$  ditolak dan terjadi perbedaan rata-rata pertumbuhan ekonomi antara daerah sektor pertanian dengan daerah sektor non-pertanian. Namun apabila probabilitas lebih besar dari tingkat penyimpangan sebesar 5 persen maka  $H_0$  tidak ditolak dan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi antara daerah sektor pertanian dengan sektor non-pertanian.

